BABI

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengangkat judul "Tingkat Kerjasama Ekonomi Jepang – Cina dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Politik Kedua Negara" karena beberapa alasan:

- ➤ Terdapat hubungan yang cukup harmonis antara Jepang dan Cina pada tingkat bawah seperti berbagai kerjasama ekonomi meskipun pada tingkat atas, elit politik atau *high politics*, hubungan kedua negara kurang stabil dan sering dihadapkan pada berbagai ancaman perpecahan yang diakibatkan oleh faktor sejarah dan militer.
- Setelah Cina memperkenalkan sistem pasar sosialisnya yang lebih terbuka, Jepang menyalurkan berbagai bentuk kerjasama ekonomi dengan jumlah yang cukup besar kepada Cina. Penulis merasa sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam manfaat kerjasama ekonomi yang telah terjalin antara Jepang dan Cina. Salah satu manfaat yang ingin penulis pahami adalah dampaknya kepada stabilitas politik kedua negara.
- ➤ Tema tulisan ini sangat sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari.

 Penulis adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dimana fokus pemebelajarannya adalah mengenai hubungan hunbungan atau interaksi antar negara di dunia.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dengan penyusunan tulisan ini adalah:

- Mengetahui seluk beluk hubungan diplomatik antara Jepang dan Cina baik pada tingkat *High politics* maupun *low politics*.
- Memahami bentuk bentuk kerja sama ekonomi yang telah tercipta antara Jepang dan Cina.
- Memahami dampak kerjasama ekonomi yang telah terjalin atara Jepang dan Cina terhadap stabilitas politiknya.

C. Latar Belakang

Hubungan Cina dan Jepang sering memanas karena faktor sejarah dan militer. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar kaum realis bahwa hubungan internasional lebih didominasi oleh para pemegang kekuasaan. "Politik tingkat tinggi" keamanan dan kelangsungaan hidup memiliki prioritas atas "politik tingkat rendah" ekonomi dan masalah sosial (Keohane dan Nye 1997:23)¹. Permasalahan internasional adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan keamanan dan kelangsungan hidup dari pada permasalahan ekonomi dan kesejahteraan. Dalam dunia yang anarki, hubungan internasional sangat dipengaruhi oleh permasalahan high politics. Dalam banyak kasus, krisis politik antara dua negara dapat mengurangi

¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, "Pengantar Studi Hubungan Internasional", Pustaka Pelajar, Yogytakarta, Februari 2005, Hlm. 153.

dan bahkan memutus hubungan ekonomi yang telah terjalian antara negara-negara tersebut. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah krisis politik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan UEA didesak Amerika Serikat untuk memutuskan hubungan ekonomi dan tetap bersikap keras terhadap Iran².

Jepang menorehkan sejarah kelam di Cina dimulai sejak perang dunia I di mana Jepang didesak oleh kerajaan Inggris untuk bersama-sama memerangi negaranegara poros. Jerman yang menguasai beberapa daerah di Cina dipukul mundur oleh Jepang yang akhirnya Jepang mengambil alih daerah tersebut.

Kekejaman militer Jepang pada masa itu sangat sulit untuk dilupakan oleh pemerintah Cina sekarang. Berbagai unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat Cina untuk meminta pertanggung-jawaban Jepang atas apa yang telah terjadi pada masa penjajahan. Protes keras kerap muncul dari Cina jika Jepang dianggap lepas tangan terhadap masalah tersebut. Masyarakat Cina pernah berunjuk rasa di kedutaan Jepang di Cina untuk memprotes buku pelajaran sejarah untuk siswa yang dianggap telah dimanilpulasi oleh Jepang.

Keadaan yang cukup tegang antara pemerintah Cina dan Jepang juga pernah terjadi ketika perdana menteri Jepang berkunjung ke Kuil Yasukuni. Pemerintah Cina beranggapan bahwa dengan berkunjungnya perdana menteri Jepang ke kuil Yasukuni berarti Jepang menghormati orang-orang yang oleh pemerintah Cina diyakini sebagai

-

² http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/21/opi03.htm didownload tanggal 17 03 08

penjahat perang. Sejarah penjajahan Jepang bukanlah hal kecil yang dapat berlalu begitu saja bagi masyarakat Cina.

Di sisi lain, pemerintah Cina berusaha untuk terus meningkatkan kekuatan militernya yang mengundang reaksi negatif dari pemerinah Jepang. Cina pernah menuai protes dari berbagai negara di dunia atas niat uji coba senjata nuklirnya. Secara khusus Jepang mengancam untuk menunda dan bahkan membekukan bantuan ekonominya jika Cina tetap bersikeras untuk melakukan uji coba senjata nuklir. Selain itu, meningkatnya anggaran militer dan uji coba rudal anti satelit Cina malahirkan kekhawatiran tersendiri bagi Jepang. Pemerintah Cina meningkatkan anggaran perbelanjaan pertahanannya lebih dari 10 persen tiap tahun selama 18 tahun berturut-turut dan dilaporkan bahwa pesawat militer Cina melanggar wilayah udara Jepang lebih dari 100 kali mulai dari tahun 2005 hingga bulan Maret tahun 2008³. Pelanggaran-pelanggaran wilayah udara tersebut diyakini ada kegiatan-kegiatan intelejen dan semua itu sebagai akibat dari moderenisasi pertahanan militer Cina.

Namun ironisnya, kerjasama ekonomi antara Jepang dan Cina, baik itu antar pemerintah maupun luar pemerintah, berjalan lancar meskipun sering terjadi instabilitas politik antara pemerintah kedua negara. Jepang dan Cina memiliki hubungan ekonomi yang sangat menguntungkan bagi kemajuan ekonomi kedua negara. Bagi Jepang, Cina merupakan pasar yang potensial dan sangat besar. Sedangkan bagi Cina, Jepang merupakan negara tetangga yang sangat kaya di mana

³ http://www.kapanlagi.com/h/0000112481.html. diakses pada tanggal 06 Maret 2008

Cina begitu membutuhkan bantuan ekonomi Jepang untuk terus membenahi perekonomiannya demi menciptakan kesejahteraan.

Saat ini Cina berkembang menjadi pasar yang sangat potensial bagi dunia internasional. Setelah memperkenalkan sistem ekonomi pasar sosialisnya, aliran dana internasional dan investasi membanjiri negara ini. Sistem ekonomi pasar yang terbuka memberikan keuntungan yang sangat baik bagi perkembangan ekonomi Cina. Tingkat populasi penduduk yang sangat tinggi juga menjadi salah satu faktor yang dapat menarik para investor inernasional. Pakar ekonomi Jeffrey Sachs dari Universitas Colombia, yang menjadi penasihat berbagai negara, menganjurkan bangsa Amerika untuk mempersiapkan diri dalam menghadapai dunia di mana pada tahun 2050 perekonomian Cina dapat mencapai 75 persen dari perekonomian mereka sendiri⁴. Masih banyak pengamat lain yang menilai bahwa Cina memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia di kemudian hari.

Meskipun demikian, Cina masih harus terus membenahi kekurangan – kekurangan baik itu infrastruktur atau fasilitas – fasilitas umum agar dapat menarik para investor internasional yang lebih banyak dan mendatangakan keuntungan – keuntungan ekonomi lainnya. Pemerataan ekonomi antara daerah pedalaman dan pesisir Cina juga menerupakan masalah yang krusial dan membutuhkan penyelesaian yang cepat untuk menekan perpindahan penduduk dari pedalaman ke kota – kota

⁴ Ian Garrick Mason, "Next Challenge: Capitalist Competition", *Philadelphia Enquirer*, 8 Juli 2004, http://www.Philly.com/mld/inquirer/news/special_packages/Sunday_review/9185839.htm?1c. Dikutip dari, Ted C. Fishman, "China INC: Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia", PT Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, Januari 2007, hlm. xxx.

besar di pesisir. Saat ini Cina masih membutuhkan bantuan dana internasional untuk melakukan perbaikan – perbaikan tersebut dan menyelesaikan permasalahan ekonomi lainnya.

Kemajuan ekonomi ini sangat penting bagi setiap negara terutama Cina, mengingat jumlah populasi yang sangat tinggi tentunya membutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Walaupun pemerintah telah mampu mengurangi laju pertumbuhan penduduknya dalam tahun – tahun belakangan ini, Cina tetaplah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Secara sederhana dapat dipahami bahwa jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan - kebutuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan pemerintah Cina menjadikan masalah kependudukan menjadi salah satu prioritas utama bersamaan dengan peningkatan ekonominya.

The Chinese government pays great attention to the issue of population and development and has placed it on the agenda as an important part of its overall plan for national economic and social development. The government consistently emphasizes that population growth should be compatible with socio-economic development and be concerted with resource utilization and environmental protection⁵.

Di lain sisi, Jepang merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang sangat maju di kawasan asia timur. Suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan kehancuran yang pernah dialaminya akibat perang dunia ke II pada tahun 1945, kini

⁵ Information Office of the State Council of the People's Republic of China, "White Paper of the Chinese Government (2000 – 2001)", Foreign Languages Press, Hlm. 338 – 339.

Jepang menjadi satu-satunya negara dengan ekonomi sangat maju di kawasan Asia Timur dan menjadi salah satu raksasa ekonomi di dunia. *Gross Domestic Product* (*GDP*) Jepang adalah \$ 4,6 triliun, berada pada urutan ke dua di bawah Amerika Serikat sedangkan GDP perkapitanya adalah \$ 36.180 berada pada urutan sembilan dibawah Amerika Serikat dan Swedia⁶.

Dr. Lim Hua Sing, Profesor dari Institute of Asia-Pacific Studies dan Graduate School of Asia-pacific Studies, Waseda University, Jepang, mengatakan bahwa sebagai salah satu adidaya ekonomi, Jepang diharapkan untuk memberikan kontribusi – kontribusi yang penting bagi perdamaian dan perkembangan ekonomi di dunia secara umum, dan secara khusus bagi kawasan Asia-Pasifik⁷.

Jepang memberikan bantuan ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, baik itu kepada negara berkembang atau negara industri baru. Hal ini memberikan stimulasi yang cukup besar bagi perkembangan eknomi negara - negara tersebut dan sekaligus menjadikan Jepang sebagai negara yang memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi negara-negara Asia.

Sebagai negara yang sangat luas, berpenduduk terbesar dan sedang melakukan berbagai perbaikan demi kemajuan ekonominya, Cina masih sangat membutuhkan bantuan dana dari negara-negara maju pada umunya, dan Jepang ada khususnya. Pemerintah Jepang memberikan tanggapan positif kepada berbagai upaya perbaikan

⁶ Japan Facts and Figures, Microsoft Student with Encarta Premium 2007 DVD, Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation

7

⁷ Lim Hua Sing, "Peranan Jepang di Asia", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 238.

yang dilakukan pemerintah Cina baik itu perbaikan sistem maupun infrastruktur, terutama setelah pemerintah Cina memperkenalakan sistem ekonomi pasar sosialisnya yang lebih terbuka.

Pemerintah Jepang menyadari pentingnya untuk tetap menjaga stabilitas politik di kawasan dengan menjalin hubungan baik dengan negara - negara di kawasannya. Hal ini tercermin dari berbagai bantuan ekonomi Jepang yang diorientasikan kepada negara - negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Secara khusus, Cina telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari kerja sama dan bantuan ekonomi Jepang tersebut.

Secara bertahap, Jepang memberikan banyak bantuan dana ke berbagai sektor ekonomi Cina dan pembangunan infrastruktur Cina yang lain. Diantara negara-negara DAC (Development Assistance Committee), Jepang merupakan donor ODA (official development assistance) terbesar bagi Cina selama periode 1991-19958 dan pada tahun 1994-1996 Cina menjadi penerima ODA terbesar Jepang⁹.

Tabel 1.1¹⁰ Pencairan ODA Negara-Negara DAC dan Organisasi-Organisasi Internasional Kepada Cina (US\$ juta)

Negara-negara DAC, Netto ODA

Tahun	1	2	3	4	5	Lain-lain	Total
1002	Jepang	Jerman	Spanyol	Italia	Prancis		
1993	1,350.7	247.8	140.1	135.5	102.6		1,976.7

⁸ *Ibid*, Hlm. 271. ⁹ *Ibid*, Hlm. 269.

¹⁰ *Ibid*.Hlm.272

1004	Jepang	Jerman	Spanyol	Prancis	Australia		
1994	1,479.4	300.0	153.1	97.7	75.6		2,105.8
1005	Jepang	Jerman	Prancis	Austria	Spanyol		
1995	1,380.2	684.1	91.2	66.2	56.0		2,277.7
1002	IDA	UNDP	WFP	EDF	UNICEF		
1993	865.1	44.8	23.8	19.5	17.6	59.2	1,030.0
1004	IDA	UNDP	WFP	UNICEF	ADB		
1994	671.0	38.4	24.9	22.5	16.7	46.6	820.1
1005	IDA	UNDP	CEC	WFP	UNICEF		
1995	798.2	38.3	32.7	21.2	20.0	57.1	967.5

Sumber: Kementerian Luar Negeri, Laporan Tahunan ODA Jepang

Tabel 1.2¹¹ **PENCAIRAN ODA JEPANG KEPADA CINA**

(US \$ juta)

Hibah				Bantuan Pinjaman			
Tahun	Bantuan Hibah	Kerjasama teknis	Total	Bruto	Netto	Total	
1992	72.05	187.48	259.53	871.27	791.23	1,050.76	
1993	54.43	245.06	299.49	1,189.06	1,051.19	1,350.68	
1994	99.42	246.91	346.33	1,298.46	1,133.08	1,479.41	
1995	83.12	304.75	387.87	1,216.08	992.28	1,380.15	
1996	24.99	303.73	328.72	774.08	533.01	861.73	

¹¹ Ibid,

Total	334.01	1,287.93	1,621.94	5,348.95	4,500.79	6,122.73
(1992-96)						

Sumber: Kementerian Luar Negeri, Laporan Tahunan ODA Jepang

Tabel 1.3¹²

DISTRIBUSI BANTUAN MENURUT BENTUKNYA KEPADA 10 NEGARA PENERIMA ODA BILATERAL JEPANG TERBESAR

(Atas dasar pembayaran netto; us \$ juta,%)

			1994			
Ranking	Negara	Besarnya	%	Uraian Bantuan Hibah	Kerjasama Teknis	Pinjaman
1	Cina	1,479.41	15.28	99.42	246.91	1,133.07
2	India	886.53	9.16	34.64	23.61	828.28
3	Indonesia	886.17	9.15	72.28	177.69	636.20
4	Filiphina	591.60	6.11	138.41	110.41	342.78
5	Thailand	382.55	3.95	27.36	137.36	217.84
6	Syiria	330.03	3.41	16.53	8.57	304.93
7	Pakistan	271.04	2.80	50.72	19.44	200.88
8	Bangladesh	227.60	2.35	204.71	35.93	-13.05
9	Srilangka	213.75	2.21	53.59	27.51	132.66
10	Mesir	188.99	1.95	129.51	20.85	38.63

¹² *Ibid* Hlm 270

_

Total 10 negara	5,457.67	56.37	827.17	808.28	3,822.22
Total seluruh dunia	9680.48	100.0	2,402.90	3,020.31	4,257.27

Sumber: Kementerian Luar Negeri, Laporan Tahunan ODA Jepang

Perusahaan-perusahaan Jepang melakukan kerjasama di berbagai cabang bisnis di Cina. Dari sektor penyediaan teknologi dan lisensi, terdapat 29 kasus kerjasama antara Jepang dan Cina lebih besar daripada kerjasama pada sektor yang sama antara Jepang dan ASEAN yang hanya terdapat 15 kasus selama periode 1991-1992. Sedangkan dari sektor OEM (*original equipment manufacturing*) pada periode yang sama, terdapat 10 kasus kerjasama antara Jepang dan Cina sama dengan kerjasama pada sektor yang sama antara Jepang dan negara-negara industri baru, lebih besar dari pada antara Jepang dan ASEAN yang hanya terdapat 9 kasus.

Bantuan ekonomi dan berbagai macam kerjasama ekonomi Jepang mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah Cina. Kesadaran akan pentingnya kemajuan ekonomi dan manfaat besar ekonomi lainnya yang dapat diperoleh dari kerjasama ekonomi telah menciptakan rasa saling ketergantungan bagi kedua negara tersebut.

Meskipun hubungan politik kedua negara kurang baik akibat faktor sejarah dan militer, kerjasama ekonomi kedua negara berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang di atas, dapat diambil sebuah pokok permaslahan sebagai berikut: "Mengapa hubungan kerjasama ekonomi secara umum antara Jepang dan Cina tetap berjalan dengan baik meskipun sering terjadi instabilitas politik antara kedua negara tersebut?"

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pengambilan Kebijakan

David Easton memberikan pengertian bahwa kebijakan adalah hal yang dihasilkan oleh sistem politik dan diterapakan secara sah pada masyarakat sebagai nilai yang harus diikuti. Pada awalnya, analisa proses pengambilan kebijakan dilakukan pada cabang ilmu yang berbeda, di luar cabang politik, yaitu para psikolog. Mereka menganalisa sifat individu-individu yang berperan dalam proses pengambilan kebijakan. Namun kemudian, para ilmuan politik menyadari arti penting memahami proses pengambilan kebijakan dalam suatu sistem politik..

Dalam menjawab permasalahan yang tercantum pada pokok permasalah, penulis mengikuti teori pengambilan kebijakan yang dikembangkan oleh Graham T. Allison, model politik birokrasi. Sebelumnya, Max weber telah berpendapat bahwa dalam politik moderen, kegiatan administratif dijalankan dalam rutinitas administrasi dan oleh sebab itu birokrasi penguasa sebenarnya. Hal ini menguatkan pendapat bahwa birokrasi memegang peranan yang sangat signifikan, selain penguasa, dalam sistem politik.

Model politik birokrasi dalam proses pembuatan kebijakan yang dijelaskan oleh Allison adalah kompetisi antara unit-unit pembuat kebijakan, dan kebijakan luar negeri adalah hasil dari kesepakatan antara komponen-komponen birokrasi. Akhirnya dalam politik internasional, para ahli yang ada pada cabangcabang pemerintahan juga memainkan peranan yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Setiap unit dalam pemerintahan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam membuat suatu kebijakan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai atau dipertahankan.

Allison's third model, the Bureucratic Politics Model, builds on the Organizational Process Model, but instead of ansumming control by leaders at the top, the Bureucratic Politics Model hypothesizes intensive competition among the decision-making units, and the foreign policies are the result of bergaining among the components of a bureucracy¹³.

Peranan para aktor, selain pemimpin negara, memiliki dampak yang sangat positif dalam hubungan Jepang dan Cina. Hersusanto, dari CSIS, berpendapat bahwa,

Kalau dilihat dari *G to G* selalu ada indikasi akan kerentanan tensi, tapi kalau bicara *people to people relation*, mengindikasikan harapan yang baik...ada kasus ketika PM Koizumi melakukan kunjungan ke Yasukuni kemudian Beijing membekukan semua rencana kunjungan tingkat tinggi diantara kedua negara. Untuk sementara waktu hubungan kedua negara dalam tensi yang tinggi. Tapi kemudian

_

¹³ James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations*, Harper Collins Publisher, New York, 1990, Hlm. 477.

Nippon Dan Ren, Kamar Dagang Jepang melakukan lobby ke Beijing dengan menyatakan bahwa permasalahan ini hanyalah *Government to Government*, tapi dalam level bisnis, dalam *level people to people*, permasalahan ini tidak menyebar. Ternyata *pattern* yang sama juga terjadi secara keseluruhan. Di satu sisi mereka punya tensi soal perbatasan, sejarah, dll tapi rupaynya ada *urgency*, ada *urgent need*, kebutuhan yang mendesak, diantaranya masalah investasi, masalah kerjasama perdagangan dan ekonomi. Itu yang lebih banyak digenerate oleh *People to People Relation*. Tampaknya kalau ini terus berlangsung, sedikit banyak akan membentuk satu opini publik bahwa kita membutuhkan situasi yang damai aman untuk bisnis dan investasi dan diharapkan situasi itu akan membawa dampak pada stabilitas keamanan dan politik¹⁴.

2. Teori Interdependensi Kompleks

Pemikiran yang penulis pakai ini adalah pemikiran yang oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen dispesifikasikan ke dalam aliran Liberalisme Interdependensi. Pada dasarnya, kaum liberal ini berpendapat bahwa pembagian tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional meningkatkan interdependensi antara negara, dan hal itu menekan dan mengurangi konflik kekerasan antar negara¹⁵.

Masing – masing pemikir memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai integrasi. Donald J. Puchala mendefinisikan integrasi sebagai sebuah proses yang menghasilkan dan menopang susunan sistem pada tingkat internasional di mana para aktor dapat mengharmonikan kepentingan mereka, mengkompromikan perbedaan dan memproleh keuntungan timbal-balik dari interaksi mereka. Philip E. Jacob

¹⁴ http://www.rsi.sg/indonesian/fokusasia/view/20070116154100/1/.html didownload pada tanggal 12 februari 2008

¹⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen, "Pengantar Studi Hubungan Internasional", Pustaka Pelajar, Yogytakarta, Februari 2005, Hlm. 148.

14

berpendapat bahwa integrasi politik adalah sebuah hubungan komunitas di antara para aktor dalam entitas politik yang sama. Secara sederhana Integrasi dapat berarti "rasa komunitas". Joseph Nye berpendapat bahwa integrasi diindikasikan oleh tingginya tingkat transaksi, baik itu perdagangan, perputaran modal, komunikasi, dan pertukaran ide serta perpindahan penduduk.

Joseph Nye mengembangkan teori "interdependensi kompleks (*Complex Interdependence*, berpendapat bahwa dalam kondisi interdependensi kompleks hubungan antar negara bukan hanya atau terutama hubungan antara para pemimpin negara; terdapat hubungan pada banyak tingkatan yang berbeda melalui banyak aktor dan cabang pemerintahan yang berbeda¹⁶. Bahkan Nye berpendapat bahwa kelompok – kelompok transnasional dan individu juga memiliki peran yang cukup kuat dalam hubungan internasinal. Akibatnya, permasalahan ekonomi dan kesejahteraan, *low politics*, menjadi isu penting dari pada permasalahan keamanan dan kelangsungan hidup, *High politics*. Para pebisnis dapat memberikan respon yang lebih cepat dari pada para diplomat dan medapatkan peluang-peluang untuk berkomunikasi dengan banyak staf lokal dalam aktivitas mereka sehari-hari¹⁷.

Menurut 'JETRO White Paper on Investment' (1993), selama periode 1991-Juni 1992, perusahaan Jepang mengalami 803 kasus kerjasama dan kolaborasi industri...dengan Asia sebanyak 215 kasus...selama periode yang sama, penyediaan teknologi dan lisensi-lisensi oleh Jepang

¹⁶ Robert Jackson dan Georg Sorensen, "Pengantar Studi Hubungan Internasional", Pustaka Pelajar, Yogytakarta, Februari 2005, Hlm.151

¹⁷ Lim Hua Sing, "Peranan Jepang di Asia", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm.14

kepada...Cina 29 kasus...Lebih lagi, OEM dari Jepang ke...Cina 10 kasus¹⁸.

Tingginya kerjasama ekonomi yang terjadi antara Jepang dan Cina disebabkan oleh kebutuhan timbal balik yang semakin tinggi. Cina berkembang menjadi negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Standar hidup masyarakat Cina semakin bertambah dan daya konsumsi domestiknya semakin meningkat. Akibatnya, kebutuhan terhadap produk-produk manufaktur seperti mobil, eletronika dan produk-produk elektrikal semakin tinggi pula. Hal ini menjadikan Cina sebagai pasar yang memiliki arti penting bagi industriindustri manufaktur Jepang. Di sisi lain, keinginan kuat untuk mendapatkan teknologi Jepang agar dapat meningkatkan produktivitas, dan transfer teknologi dari Jepang ke negara-negara Asia akan terus menjadi kepedulian utama para pengambil kebijakan maupun para investor¹⁹ untuk meningkatkan daya saing produsen.

Joseph Nye menyempurnakan konsep spill over yang ada sebelumnya. Spill over berarti meningkatnya kerjasama di suatu wilayah atau bagian dapat mengakibatkan peningkatan kerjasama pada yang lainnya. Nye berpendapat bahwa ketidakseimbangan yang tercipta akibat kerjasama akan mendesak aktor politik untuk menegaskan kembali konsep kerjasama mereka. Dia menyadari bahwa penegasan kembali tidak selalu berarti peningkatan kerjasama namun juga dapat berarti negatif atau kemunduran yang disebutnya dengan spill back.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 219-221 ¹⁹ *Ibid*, Hlm. 220

Kerjasama antar bangsa tidak selalu mengalami peningkatan namun terkadang mengalami masa stagnasi dan kemunduran. Hal ini tentunya tergantung pada keuntungan timbal-balik yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Interdependensi kompleks jelas menyatakan hubungan yang jauh lebih bersahabat dan kooperatif di antara negara²⁰.

F. Hipotesa

Jawaban sementara yang dapat ditarik untuk menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan adalah hubungan ekonomi antara Jepang dan Cina tidak didominasi oleh para pemimpin negara namun oleh aktor-aktor lain, seperti para ahli yang ada di departemen-departemen tertentu pada cabang pemerintahan, yang memainkan peranan signifikan.

G. Jangkauan Penelitian

Agar penulisan ini tidak melebar, maka perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Penulis lebih memfokuskan penulisan ini pada hubungan kerjasama ekonomi Jepang dan Cina setelah Cina memperkenalkan sistem pasar sosialisnya pada tahun 1979.

²⁰ Robert Jackson dan Georg Sorensen, "Pengantar Studi Hubungan Internasional", Pustaka Pelajar, Yogytakarta, Februari 2005, Hlm. 151.

H. Metode Pengumpulan Data

Hasil dari penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis, artinya dengan penggambaran umum atas peristiwa/kejadian, kemudian dianalisa hingga didapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menggali studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak, internet, dan sumbersumber lain yang dianggap masih relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang telah ditetapkan. Meskipun manganalisa dengan data sekunder, penulis merasa yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenaran ilmiahnya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagaimana yang tertulis di bawah ini:

BAB I : Bab ini berisi penjelasan mengenai alasan penulis dalam memilih judul, tujuan penulisan skripsi dan latar belakang penulisan serta teori-teori dan unsur-unsur lain yang akan membimbing penulis dalam menyusun penelitian ini.

BAB II : Pada Bab II ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai hubungan diplomatik Jepang dan Cina pada tingkat *High Politics* serta faktor – faktor yang mengancam stabilitas politik kedua negara.

BAB III : Pada bab III ini berisikan tentang bentuk – bentuk kerjasama ekonomi yang telah terjalin antara Jepang dan Cina dan perkembangan ekonomi kedua negara.

BAB IV : Pada bab IV ini penulis mengisi penulisan dengan manfaat kerjasama ekonomi Jepang dan Cina dan dampaknya terhadap stabilitas politik mereka.

BAB V : Pada bab V ini adalah kesimpulan dari apa yang ada dari bab-bab sebelumnya.